

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang bijak bagi masyarakat adalah pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development adalah pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup orang di seluruh dunia, baik dari generasi sekarang maupun yang akan datang, tanpa mengeksploitasi penggunaan sumberdaya alam yang melebihi kapasitas dan daya dukung bumi. Tujuan tersebut bisa dicapai melalui empat elemen tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu: (1) Pertumbuhan dan keadilan ekonomi; (2) Pembangunan sosial; (3) Konservasi sumberdaya alam (perlindungan lingkungan); (4) Pemerintahan yang baik (good governance). Keempat elemen tersebut saling mendukung satu sama lain, sehingga dapat menciptakan tujuan pembangunan yang berkaitan dan berkelanjutan. (Nestle, 2020)

Sustainable Development Goals (SDGs) atau dikenal juga sebagai tujuan global dibawah naungan United Nations Development Programme (UNDP) yang secara universal menyerukan aksi pemberantasan kemiskinan, melindungi bumi serta memastikan semua orang menikmati perdamaian dan kesejahteraan. SDGs lahir pada konferensi PBB dalam pembangunan di Rio de Janeiro pada tahun 2012 (UNDP, 2020). Dalam agenda sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 25 September 2015 yang diselenggarakan di New York, Amerika Serikat secara resmi mengesahkan SDGs sebagai sebuah kesepakatan pembangunan global. Tujuan ini merupakan kelanjutan atau pengganti dari Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015. (Bappenas, 2020).

Dalam hal ini, Indonesia telah berkomitmen untuk mendukung terlaksananya program PBB yang diberi nama Sustainable

Development Goals atau SDGs tersebut. Peraturan Presiden RI No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah ditetapkan pada tanggal 10 Juli 2017. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Indonesia sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Indonesia turut berpartisipasi mewujudkan SDGs, karena di Indonesia sendiri pembangunan masih tertumpu pada pembangunan ekonomi dan pembangunan infrastruktur secara sentralisasi sehingga mendorong ketidakmerataan pembangunan dan muncul kesenjangan satu daerah dengan daerah lainnya. Kesenjangan-kesenjangan inilah yang dapat meningkatkan kemiskinan, fasilitas pendidikan yang tidak memadai, serta akses kesehatan yang kurang berkualitas. Permasalahan pembangunan Indonesia juga terletak pada tingginya disparitas (kesenjangan) antarwilayah.

Menurut Armida Alisjahbana, hal ini terlihat dari segi kegiatan ekonomi, pembangunan infrastruktur, sampai tingkat kemiskinan yang begitu timpang. Adanya disparitas tersebut terjadi karena aktivitas ekonomi yang juga timpang. Di kota yang menjadi pusat bisnis, segala sarana dan prasarana tergarap dengan baik. Akan tetapi, di daerah yang bukan pusat bisnis, sarana dan prasarana tidak tergarap. Hal ini kemudian yang membuat aktivitas ekonomi jadi rendah di banyak daerah (Kompas, 2010). Aktivitas ekonomis rendah, tingkat kemiskinan pun menjadi tinggi, sehingga dalam SDGs masalah-masalah ini masuk ke dalam poin:

- 1) Menghapus kemiskinan,
- 3) Kesehatan yang baik dan kesejahteraan,
- 4) Pendidikan bermutu,
- 6) Akses air bersih dan sanitasi,
- 8) Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi,
- 10) Mengurangi Ketimpangan,
- 17) Kemtiraan untuk mencapai tujuan.

Namun dalam mencapai target tersebut, pemerintah Indonesia mengalami kesulitan. Bahkan, pemerintah Indonesia memandang sampai tahun 2018 Indonesia belum mencapai tahap yang optimal. Salah satunya mengenai penyediaan air bersih yang dikhawatirkan sulit tercapai. Pemerintah Indonesia mengalami kesulitan dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan karena pada saat yang bersamaan, pemerintah Indonesia harus menanggung beban program-program lain yang memerlukan banyak biaya. Di sisi lain, beberapa program yang tercantum di Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Dengan adanya masalah dan beban yang dialami Indonesia di atas, maka pemerintah Indonesia mengajak aktor-aktor lainnya, mulai dari perusahaan-perusahaan multinasional atau stakeholders di Indonesia, organisasi non pemerintah, bahkan sampai ke taraf masyarakatnya sebagai individu didalam negara untuk dapat mewujudkan target dari SDGs tersebut.

Multinational Corporations (MNCs) adalah aktor hubungan internasional non-negara yang berinteraksi dengan pemerintah untuk kepentingan kebijakan yang akan diberikan. MNCs membantu jalannya hubungan internasional dalam sektor ekonomi. Mereka terlibat dalam kegiatan ekonomi transnasional. Perusahaan-perusahaan multi nasional ini membantu memenuhi kebutuhan tiap negara yang ada di dunia. (Willetts, 2001)

Menurut Collingsworth di jurnalnya yang berjudul “*Beyond Public Relations: Bringing the Rule Of Law To Corporate Codes Of Conduct In The Global Economy*” pada tahun 2006, MNCs memilih negara berkembang untuk mengembangkan dan memperluas sumber daya mereka dan di negara berkembang mereka hanya akan mendapatkan halangan-halangan yang minimal. Pemerintah dari negara berkembang juga mengasumsikan bahwa kedatangan MNCs di negaranya akan menciptakan “*locomotive effect*” pada pertumbuhan dan kesejahteraan negara.

Indonesia menjadi salah satu destinasi Multinational Corporations (MNCs) untuk menginvestasikan sumber daya modal mereka, memperoleh kemudahan untuk mendapatkan sumber daya natural hingga pekerja dengan biaya yang rendah juga merupakan sebuah faktor yang menggembirakan bagi Multinational Corporations (MNCs). Hal inilah yang membuat banyak Multinational Corporations memutuskan untuk mendirikan perusahaan cabangnya di Indonesia dan perusahaan tersebut salah satunya Nestle.

Nestle Indonesia adalah anak perusahaan Nestle S.A., yang berpusat di Vevey, Swiss, dan telah beroperasi selama 150 tahun. Sebagai perusahaan gizi, kesehatan dan keafiatan terkemuka di dunia, Nestle mulai beroperasi di Indonesia tahun 1971. Nestle Indonesia mendapatkan peringkat kedua dari tujuh perusahaan peraih predikat *Indonesia Green Company* 2017. *Indonesia Green Companies* diselenggarakan oleh majalah SWA setiap tahun untuk menyeleksi perusahaan-perusahaan terbaik dalam mengelola bisnis yang ramah lingkungan. Pada tahun 2017 merupakan ketiga kalinya Nestle Indonesia meraih penghargaan tersebut secara berturut-turut. (Nestle, 2017)

Masuknya Nestle ke Indonesia menjadi era baru bagi Indonesia untuk tidak hanya menerima segala benefit dari hadirnya sebuah perusahaan multinasional di sosial dan lingkungan Indonesia. Banyak tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia di samping segala tawaran yang diberikan oleh Nestle, seperti penguasaan lahan, pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Indonesia, dampak dari kehadirannya terhadap sosial dan lingkungan sekitar, mengingat Nestle merupakan salah satu perusahaan besar yang kemudian masuk ke negara berkembang seperti Indonesia.

Pada tahun 1980-an, tindakan dari sebuah MNC tercatat oleh beberapa penelitian hanya akan progresif dan akuntabel jika untuk kepentingan mereka saja. Pandangan tersebut mengartikan bahwa tindakan sebuah MNC, termasuk Nestle, menjadi sebuah tindakan yang berporos terhadap sifat *Profit-*

Oriented atau juga dapat diartikan bahwa segala tindakannya hanya demi nama baik brand yang menargetkan keuntungan. Hal ini membuat ketiadaan tindakan tanggung jawab yang legal di dalam aktivitas sistem kepentingan korporasi terhadap sosial dan lingkungan dimana mereka menjalankan industrinya. (Digdowiseiso, 2010)

Meski begitu, PT. Nestle Indonesia pun memiliki berbagai tantangan dalam mewujudkan SDGs di Indonesia, contohnya seperti bagaimana cara meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa PT. Nestle memang benar-benar ingin berkontribusi untuk memperbaiki gizi masyarakat Indonesia, bagaimana cara untuk bekerjasama antara masyarakat Indonesia dan pihak-pihak terkait seperti pemerintah dan NGO untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Selain itu, tingkat kemiskinan yang tinggi juga menjadi hambatan besar bagi PT. Nestle untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Selain tantangan dan hambatan tersebut, PT. Nestle juga sangat memikirkan bagaimana agar dalam menciptakan SDGs ini, pihak PT. Nestle tidak mengalami kesulitan dalam masalah biaya, karena hal ini membutuhkan biaya yang cukup besar, serta memikirkan juga bagaimana cara melatih mitra untuk dapat terjun ke lapangan dengan baik. Selain itu PT. Nestle juga berusaha keras untuk menciptakan lingkungan pabrik yang tetap bersih, tanpa ada limbah yang dapat mencemari lingkungan dan asap dari pabrik yang dapat mempengaruhi lapisan ozon.

B. Rumusan Masalah

Dari kompleksitas yang terjadi di dalam pembangunan berkelanjutan dalam rangka perwujudan SDGs di Indonesia dan kehadiran Nestle sebagai sebuah Multinational Corporation (MNC) di Indonesia, muncul sebuah pertanyaan: “Bagaimana kerja sama antara PT. Nestle dengan Pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan?”

C. Kerangka Teori

1. Konsep Kerja Sama Transnasional

Konsep Kerja Sama Transnasional menempatkan penekanan utama pada peran aktor non-negara terutama “*sekretariat*” organisasi regional, asosiasi kepentingan dan gerakan sosial yang telah terbentuk di tingkat wilayah dalam memberikan dinamika untuk intergrasi lebih lanjut. Negara anggota tetap menjadi aktor penting dalam prosesnya, mereka akan menetapkan persyaratan kesepakatan awal, namun tidak menentukan arah dan tingkat perubahan selanjutnya. Menurut konsep ini, integrasi regional bersifat sporadis dan adanya proses konflik, namun dalam demokrasi dan representasi pluralistik, pemerintah nasional akan semakin terjerat dalam tekanan regional dan akhirnya konflik diselesaikan dengan memperluas cakupan dan memberikan wewenang kepada organisasi regional yang telah dibuat. Pada akhirnya warga akan mulai mengalihkan harapan mereka ke wilayah tersebut.

Menurut David Mitrany seorang sarjana Inggris, sejarawan, dan ahli teori politik kelahiran Rumania, mengatakan konsep ini menekankan pada peranan aktor-aktor non-negara terutama “*sekretariat*” organisasi regional yang terlibat dalam beberapa kepentingan yang membantu dalam meningkatkan terjadinya sebuah intergrasi. Menurutnya “*Transnational Cooperation*” sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi negara-negara khususnya di daerah Eropa pasca perang untuk merekonstruksi negara dan mempersiapkan negara-negara tersebut untuk memasuki babak baru dalam dunia internasional. (Schmitter, 2003)

Inti dari konsep Kerja Sama Transnasional ini adalah sebuah kerja sama antara sektor pemerintah dan kemudian akan diperluas dengan beberapa sektor lainnya. Seiring berjalannya waktu, negara akan lebih melekat dalam proses intergrasi dan akan memerlukan “biaya” untuk meningkatkan kerja sama (Baylis, 2011). Manfaat positif yang bisa didapatkan dari konsep “*Transnational Cooperation*” menurut para ilmuwan di tahun

1960an dan 1970an lebih ditujukan kepada para pedagang yang mendapatkan banyak keuntungan, namun sisi negatif yang harus dihadapi adalah kedaulatan negara-negara akan terancam.

Dalam hal ini, Korporasi Global atau transnasional merupakan perusahaan bisnis apapun yang mempunyai tujuan bisnis global dengan menghubungkan sumber daya dunia dengan kesempatan pasar dunia. Kerja sama transnasional tersebut telah bereaksi terhadap kekuatan yang mendorong, menghambat, dan yang melandasi dunia. Perusahaan global telah memberikan reaksi terhadap pasar yang semakin terbuka dan terhadap ancaman persaingan yang mendunia. Pada waktu yang sama, menjadi salah satu kekuatan yang mendorong dunia ke arah globalisasi yang lebih besar. Perusahaan transnasional sendiri merupakan perusahaan yang dalam kegiatan operasionalnya melintasi batas-batas kedaulatan suatu negara dimana perusahaan tersebut pertama didirikan untuk membentuk anak perusahaan di negara lain yang dalam operasionalnya dikendalikan oleh perusahaan induknya.

Kerja sama internasional diciptakan untuk membangun relasi antar aktor hubungan internasional lainnya. Selain itu, adanya kerja sama internasional juga dapat memberikan kesempatan bagi suatu negara khususnya negara berkembang untuk mencapai pembangunannya melalui bantuan-bantuan dari negara maju.

Dalam perkembangan global, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan *Prinsip Ruggie* yang juga meletakkan kewajiban penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia pada aktor lain selain negara, termasuk pelaku bisnis. Pelaku bisnis harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam berusaha. Para pelaku bisnis boleh berusaha, namun dalam menjalankan bisnisnya tidak boleh menyuap, melakukan kekerasan, dan merusak lingkungan hidup, terlebih yang mengakibatkan hilangnya hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Melakukan pelanggaran atasnya, sama artinya dengan melakukan kejahatan lingkungan dan kejahatan kemanusiaan. (Tarigan, 2015)

Agenda global yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan tersebut telah diterima dan disepakati oleh banyak negara-negara di dunia yang tergabung ke dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa termasuk Indonesia. Terkait hal itu dapat dihubungkan dengan politik luar negeri yang dianut Indonesia yaitu bersifat bebas aktif, arah politik luar negeri ini menjadikan Indonesia banyak terlibat ke dalam kesepakatan internasional hingga menjalin kerja sama antar negara.

Tujuan-tujuan pembangunan bersama yang menjadi agenda global dapat dicapai melalui bagian-bagian yang tak terpisahkan dalam realisasinya, setiap orang perlu untuk melakukan bagiannya masing-masing yang meliputi pemerintah, sektor pribadi, masyarakat sipil, dan orang-orang seperti kita. (UN, 2017)

Indonesia adalah salah satu negara yang turut berpartisipasi dan menanggapi serius berbagai isu bersama di dalam level internasional. Isu yang tak kalah penting dan tengah meluas adalah isu terkait kesejahteraan dan lingkungan. Kesejahteraan dan lingkungan adalah suatu kebutuhan yang tidak terpisahkan bagi makhluk hidup, oleh karena itu, Indonesia turut menanggapi isu ini. Terlebih isu-isu tersebut termasuk ke dalam program global Sustainable Development Goals (SDGs). Kesejahteraan dan lingkungan masuk ke dalam poin-poin SDGs yang terdiri dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan pokok dari agenda global tersebut adalah mengakhiri kemiskinan, melindungi planet dan menjamin kemakmuran bagi semua orang. Lingkungan merupakan salah satu isu transnasional yang penting. Pertumbuhan populasi manusia menghasilkan permasalahan dimana terjadinya pengabaian terhadap perawatan ekosistem seperti air, pangan, obat, dan udara bersih sebagai pendukung kehidupan (envirosecurity, 2018).

Pengangkatan isu lingkungan hidup telah menjadi permasalahan penting dan utama saat ini di seluruh dunia, tidak dapat dipungkiri bahwa modernisasi dan globalisasi banyak menyumbang proses kerusakan lingkungan. Konteks

modernisasi dan globalisasi disini berpatokan pada aktivitas industri yang pesat, pasar industri terus melakukan ekspansi hingga mengorbankan lingkungan tanpa disadari hal ini mampu mempengaruhi keseimbangan hidup antara makhluk hidup dan lingkungan.

Kerusakan lingkungan bukanlah masalah tunggal, masalah selanjutnya akan mengikuti sebagai konsekuensinya. Ketimpangan sosial, hilangnya habitat flora dan fauna, bencana alam, adalah beberapa konsekuensi dari kerusakan lingkungan, hal ini tentu menanggalkan komitmen bersama untuk melakukan kesetaraan dan kemakmuran. Fenomena konsekuensi atas aktivitas industri dirasa banyak meninggalkan perhitungan dalam realisasinya. Perhitungan dampak industri didasarkan pada aspek lingkungan, sosial, ekonomi, serta budaya, selain itu aktivitas industri turut menimbulkan dampak lingkungan pada berbagai kegiatan seperti kegiatan pertanian, kesehatan, pemukiman, hingga kegiatan masyarakat lainnya. (Salim, 1987)

Dalam membantu mewujudkan SDGs, perusahaan multinasional tidak hanya melakukan ekspansinya ke negara lain merupakan suatu kepentingan bisnis bagi perusahaan tersebut. Namun, saat ini perusahaan multinasional juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap berbagai sektor di negara yang menjadi tujuan investasinya sehingga negara penerima investor asing juga dapat memperoleh manfaat dari kehadiran para investor asing tersebut bukan hanya sekedar untuk mencari keuntungan.

Salah satu perusahaan multinasional yang turut berpartisipasi dalam mewujudkan SDGs adalah PT. Nestle. Perusahaan ini telah banyak memproduksi produk-produk makanan atau minuman yang mengandung nutrisi yang baik untuk kesehatan. PT. Nestle juga memiliki berbagai program-program yang dapat menunjang kesehatan masyarakat Indonesia. PT. Nestle memiliki komitmen untuk terus meningkatkan produk- produknya dengan mengembangkan ilmu dan teknologi agar dapat menghasilkan makanan dan

minuman yang bergizi (Nestle, 2010). Perusahaan multinasional sering dinilai negatif akibat sering mencemari lingkungan, maka dari itu PT. Nestle Global menciptakan *Creating Shared Value (CSV)* yang harus diterapkan oleh anak cabang agar dapat mewujudkan *SDGs*.

2. Konsep Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals atau *SDGs* adalah seperangkat program dan target yang ditujukan untuk pembangunan global di masa mendatang. *SDGs* dibahas secara formal pada *United Nations Conference on Sustainable Development* yang dilangsungkan di Rio De Janiero, Juni 2012. Masa berlaku *SDGs* mulai tahun 2015 sampai 2030 yang disepakati oleh lebih dari 190 negara berisikan 17 goals dan 169 sasaran pembangunan. Tujuan-tujuan tersebut diharapkan dapat menjawab ketertinggalan pembangunan negara-negara di seluruh dunia, baik di negara maju (konsumsi dan produksi yang berlebihan, serta ketimpangan) dan negara-negara berkembang (kemiskinan, kesehatan, pendidikan, perlindungan ekosistem laut dan hutan, perkotaan, sanitasi dan ketersediaan air minum). (*Sustainable Development Goals*, 2020)

Adapun 17 tujuan *SDGs* yaitu; (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesenjangan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. (Bappenas, 2020)

Laporan Konferensi PBB menjabarkan bahwa pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga pilar utama, yaitu *economy, social, and environmental* yang saling bergantung

dan menguatkan (UN, 2002). Pembangunan berkelanjutan menuntut masyarakat memenuhi kebutuhan manusia dengan meningkatkan potensi produktif dengan cara-cara yang ramah lingkungan, serta menjamin tersedianya kesempatan yang adil bagi semua pihak. (UN, 1987)

Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan yang baru sebagai kelanjutan dari Millennium Development Goals (MDGs) yang disepakati oleh negara anggota PBB pada tahun 2000 dan berakhir pada akhir tahun 2015. Terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu deflation sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, food and energy security, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin.

SDGs dirancang secara partisipatif, yang artinya SDGs dirancang dengan melibatkan seluruh aktor yang berhubungan dalam tujuan-tujuan SDGs, baik itu pemerintah, Civil Society Organization (CSO), Multinasional Corporation (MNC), akademisi, bahkan sampai ke masyarakatnya sebagai aktor individu di dalam negara (UGM, 2020). Sementara itu, Multinational Corporations (MNCs) adalah aktor hubungan internasional non-negara yang berinteraksi dengan pemerintah untuk kepentingan kebijakan yang akan diberikan. MNCs membantu jalannya hubungan internasional dalam sektor ekonomi. Mereka terlibat dalam kegiatan ekonomi transnasional. Perusahaan-perusahaan multinasional ini membantu memenuhi kebutuhan tiap negara yang ada di dunia (Willetts, 2001) .

MNC sendiri merupakan aktor yang berperan penting dalam pencapaian SDGs. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa rancangan dari SDGs yang melibatkan seluruh aktor yang salah satu aktor pentingnya yakni pemerintah yang nantinya pemerintah ini akan bekerjasama dengan MNC, dimana keduanya saling memiliki power yang kuat, sehingga tujuan-tujuan dari SDGs dapat terlaksana dengan baik. Sebab, berbagai aktivitas perusahaan membawa dampak

yang nyata terhadap kualitas kehidupan manusia baik itu terhadap individu, masyarakat, dan seluruh kehidupan. Terjadinya deforestasi, pemanasan global, pencemaran lingkungan, kemiskinan, pendidikan, penyakit menular, akses hidup dan air bersih, berlangsung terus-menerus, sehingga MNC memunculkan konsep Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai tanggung jawab sosial yang harus dimiliki oleh perusahaan.

Salah satu MNC yang sudah banyak mengambil peran penting dalam pelaksanaan tercapainya SDGs yaitu PT. Nestle. Perusahaan ini telah lama menerapkan konsep CSR, yang mana konsep ini telah banyak membantu pemerintah untuk mewujudkan 3 pilar dari SDGs.

D. Hipotesa

Merujuk kedalam latar belakang masalah dan kerangka konseptual, muncul hipotesis mengenai penelitian ini, bahwa PT. Nestle dalam mewujudkan agenda SDGs di Indonesia adalah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan LSM lokal untuk menerapkan Creating Shared Value (CSV) dengan sasaran *economy, people, dan environment*.

E. Tujuan Penelitian

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana jalannya kerja sama Nestle sebagai sebuah Multinational Corporation (MNC) dalam mendukung agenda SDGs di Indonesia. Mengingat Nestle menjadi salah satu perusahaan multinasional yang turut memanfaatkan sumber daya alam dan juga memberikan dampak atas kehadirannya terhadap sosial dan lingkungan yang membuatnya juga harus turut bertanggung jawab dalam pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia sesuai dengan PERPRES nomor 59 tahun 2017.

F. Metode Penelitian

Dalam penyelesaian suatu permasalahan di dalam suatu penelitian, hadirnya sebuah metode penelitian menjadi penting. Metode penelitian merupakan sebuah metode dalam mengumpulkan dan memperoleh data-data yang dibutuhkan di dalam penelitian tersebut, baik data yang bersifat primer maupun sekunder. Data-data inilah yang kemudian dapat digunakan sebagai komponen yang diperlukan dalam menyusun sebuah penelitian dan menganalisa faktor-faktor yang saling berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan, sehingga akan terdapat suatu kebenaran dari data-data dan hasil yang akan diperoleh.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif dengan menelaah fokus kasus dan melihat faktor subjektif dari tingkah laku dari aktor serta mengumpulkan data, guna mengungkapkan pemaknaan objek terhadap suatu fenomena yang terjadi.

Strategi pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dengan menganalisa. Ini bersifat Studi Pustaka dengan cara mengumpulkan, mempelajari, menganalisa data-data bersifat sekunder yang diperoleh melalui berbagai macam sumber baik itu buku, jurnal, artikel, surat kabar, ataupun dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan oleh aktor terlibat secara langsung dan berbagai sumber-sumber lain yang berbentuk dalam media elektronik (yang dapat diakses melalui internet).

Dalam menulis penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dan argumentatif yang diharapkan dapat menggambarkan sekaligus menjawab pokok permasalahan yang sudah dirumuskan.

G. Jangkauan Penelitian

Agar obyek penelitian menjadi jelas dan lebih spesifik serta memudahkan peneliti dalam pencarian data dan fakta untuk menjawab persoalan-persoalan yang diangkat dalam penelitian ini, penulis memberi batasan materi yang terfokus terhadap

jalannya kontribusi yang diberikan oleh Nestle sebagai sebuah Multinational Corporation (MNC) dalam mendukung agenda SDGs di Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

Dalam mewujudkan sebuah penulisan yang tersusun sistematis, penulis menyusun dan membagi penulisan skripsi ini menjadi lima bab yang masing-masing berisi tentang:

BAB I, Bab ini menjadi bagian pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, tujuan penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II, Bab ini berisi pembahasan terkait SDGs, pencapaian SDGs di Indonesia, serta aktor-aktor yang terlibat didalamnya.

BAB III, Bab ini akan memaparkan bagaimana cara implementasi program CSV PT. Nestle Indonesia dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia yang dibuktikan dengan fakta dan analisa tentang program yang telah dijalankan.

BAB IV, Menjadi bab yang akan menyimpulkan seluruh hasil dari penelitian.